



**Revisi
RENCANA KINERJA
TAHUNAN
(RKT)**

Tahun 2026

**PENGADILAN NEGERI BOBONG
KELAS II**

Jalan Talo
Nomor 2,
Desa Wayo.
Kecamatan
Taliabu Barat.
Kabupaten
Pulau Taliabu
Provinsi
Maluku Utara
97794.
[www.pn-
bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id)



www.pn-bobong.go.id



pnbobong06@gmail.com



Pengadilan Negeri Bobong

REVISI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2026

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II



Pengadilan Negeri Bobong Kelas II
Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo
Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara 97794
pnbobong06@gmail.com

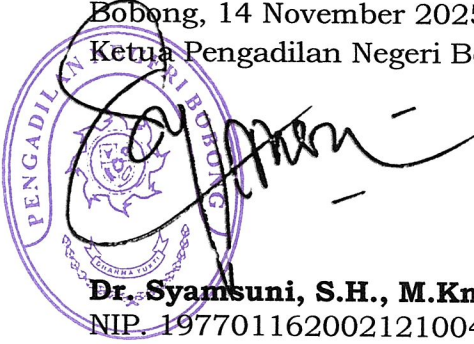


**REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	100%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tetap waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi putusan perdata	82%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif	85%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	20%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	85%
		1.10 Persentase perkara perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e Berpadu)	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)	100%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	3,82%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80,1%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	97,2%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	93,4%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	77%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	77%
		3.6 Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30%

Bobong, 14 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.
NIP. 197701162002121004

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
Tahun 2027

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II



Pengadilan Negeri Bobong Kelas II
Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo
Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara 97794
pnbobong06@gmail.com



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG
NOMOR : 97 /KPN.W28-U6/SK.RA1.9/I/2026**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2027
PENGADILAN NEGERI BOBONG**

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Bobong yang selaras dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ternate Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Bobong, maka perlu adanya sasaran dan target indikator kinerja yang disusun sebagai pengawasan; pedoman, pengendalian serta;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Bobong tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Bobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN 2027 PENGADILAN NEGERI BOBONG.**

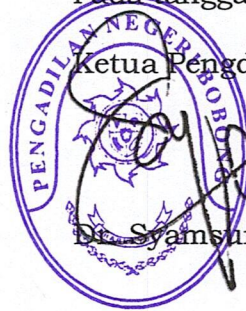
Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2027;

Ketiga : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bobong,



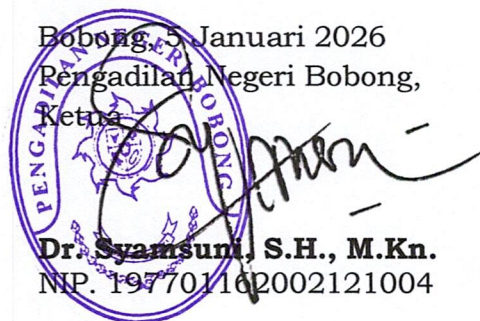
Dr. Syamsuni, S.H., M. Kn

RENCANA KINERJA TAHUN 2027
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	100%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tetap waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi putusan perdata	83%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif	90%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	30.5%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	90%
		1.10 Persentase perkara perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e Berpadu)	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	3.84%

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80.2%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	97,3%
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	93,5%
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78%
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	78%
		3.6	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,40%

Bobong, 5 Januari 2026
Pengadilan Negeri Bobong,
Ketua



Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.
NIP. 197701162002121004